

STRATEGI KELANGSUNGAN HIDUP RUMAH TANGGA MISKIN DI PEDESAAN

Muntyah*
Sukamdi**

Abstract

There are evidences that development in the last three decades has succeeded to lower the number of people living under poverty line. However, along with the economic recession this success may not continue, even it may be worsened. This study aims to understand survival strategies of the poor people in rural areas. There are at least four strategies done by the poor people. First of all, the poor people work longer to increase their income. Secondly, because of limited employment opportunity in rural areas, they commute to the city to involve in non farm activities. In addition, the poor people try to maximize the utilization of household member to get additional money for the household or to lower expenditure. The last strategy is to find additional jobs as the mean to increase their income. In some extends, there are still a lot of poor people who can not afford all strategies mentioned above, since they have limited access for increasing their income.

Kemiskinan di Pedesaan

Pembangunan nasional secara normatif bertujuan untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Hal ini mengandung pengertian bahwa hasil pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat secara adil dan merata, tidak terkecuali bagi rakyat yang tinggal di pedesaan, yang kurang lebih berjumlah 70 persen dari seluruh rakyat Indonesia. Dalam skala tertentu, ada beberapa indikasi bahwa pembangunan telah berhasil dengan

baik, yang dapat dilihat dari indikator ekonomi, antara lain, dari pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi dan peningkatan infrastruktur (sarana fisik) yang lebih baik. Hal itu dapat dilihat misalnya dalam Pelita V pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 7,3 persen per tahun (Mubyarto, 1993). Meskipun demikian, pertumbuhan ekonomi yang relatif baik ini belum berarti bahwa hasil pembangunan juga dapat dinikmati oleh seluruh atau sebagian besar penduduk.

* Muntyah, S.Si. adalah alumni Jurusan Geografi Manusia, Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

** Drs. Sukamdi, M.Sc. adalah sekretaris Pusat Penelitian Kependudukan, Universitas Gadjah Mada dan staf pengajar Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Pembangunan telah mampu mengurangi jumlah penduduk miskin, terutama yang ada di pedesaan, baik dari segi absolut maupun relatif. Pada tahun 1976 penduduk miskin di pedesaan adalah 44,2 juta jiwa (40,37 persen), turun menjadi 17,2 juta jiwa (13,79 persen) pada tahun 1993 (BPS, 1993b). Meskipun telah terjadi penurunan jumlah penduduk miskin dalam kurun waktu 1976-1993, secara absolut jumlah penduduk miskin masih banyak dan memerlukan perhatian semua pihak.

Pengurangan penduduk miskin tersebut perlu dikalkulasi kembali, terutama pada kuartal akhir tahun 1997 dan awal 1998, ketika badai resesi ekonomi mengguncang Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Di satu pihak, resesi ekonomi yang berlarut-larut telah menyebabkan kenaikan harga 9 bahan pokok, di pihak lain juga telah menyebabkan ribuan, bahkan jutaan orang kehilangan pekerjaan. Hal ini telah mengakibatkan daya beli masyarakat menurun dan menyebabkan jumlah penduduk miskin juga membengkak. Dengan demikian, segala keberhasilan yang telah disebutkan di atas perlu dikaji ulang. Dengan kondisi ekonomi yang "tidak menentu" tersebut, kelanjutan dari keberhasilan pembangunan pada masa yang akan datang menjadi pertanyaan menarik.

Sementara itu, akar permasalahan kemiskinan di pedesaan masih tetap berlangsung, yaitu semakin menyempitnya kepemilikan lahan pertanian. Petani di pedesaan pada umumnya memiliki luas lahan pertanian kurang dari 0,5 ha. Bahkan, kurang lebih 50 persen dari penduduk di pedesaan

Jawa tidak mempunyai lahan pertanian (sawah), sedangkan petani pemilik sebagian besar hanya memiliki sawah kurang dari 0,2 ha (Mantra, 1992: 6). Dengan memperhatikan bahwa sebagian besar penduduk pedesaan masih menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian, maka sangat wajar apabila kemiskinan pada umumnya muncul di pedesaan. Sementara itu, jumlah penduduk miskin cenderung meluas karena di pedesaan telah terjadi pergeseran tenaga kerja dari sektor pertanian yang dianggap mempunyai produktivitas rendah ke sektor jasa (terutama yang mengandalkan kekuatan fisik) yang mempunyai produktivitas rendah pula (Effendi, 1993).

Di samping pemilikan lahan pertanian yang sempit, masalah kemiskinan yang ada di pedesaan juga berakar dari kesempatan kerja yang terbatas. Sektor pertanian yang menjadi tumpuan hidup masyarakat pedesaan ternyata tidak mampu lagi menampung pertambahan tenaga kerja di pedesaan. Sektor pertanian di samping telah jenuh oleh tenaga kerja, juga merupakan sektor yang tidak lagi diminati terutama oleh generasi muda. Pada tahun 1960-1980 kesempatan kerja yang tersedia di sektor pertanian mengalami penurunan dari 70 persen menjadi 58 persen, sedangkan sektor lainnya (industri dan jasa) mengalami kenaikan masing-masing naik dari 8 persen menjadi 12 persen dan sektor jasa naik dari 17 persen menjadi 30 persen (Rahardjo, 1989: 9). Hal ini menunjukkan bahwa daya serap sektor pertanian pada periode tersebut mengalami penurunan.

Banyak penelitian yang telah dilakukan, terutama di pedesaan Jawa sesudah merdeka, berusaha mengungkap sebab-sebab yang menimbulkan adanya kemiskinan. Menurut Geertz (1974) meluasnya kemiskinan di pedesaan Jawa adalah akibat adanya proses involusi pertanian. Proses involusi pertanian adalah suatu proses pertumbuhan tanpa diikuti oleh adanya perubahan atau pertumbuhan yang terjadi adalah pertumbuhan ke dalam atau ekspansi horizontal. Sektor pertanian terus-menerus menyerap angkatan kerja tanpa diikuti oleh perubahan struktural. Akibatnya, mekanisme pembagian penghasilan diikuti oleh melanggengnya derajat homogenitas sosial ekonomi melalui pembagian penghasilan yang relatif kecil menjadi bagian yang lebih kecil lagi. Gejala ini menimbulkan adanya pemerataan kemiskinan atau *shared poverty* yang ditandai oleh meluasnya kemiskinan.

Tanggapan terhadap Geertz antara lain muncul dari Collier (Effendi, et al., 1993) yang menyatakan bahwa teori Geertz merupakan hasil pengamatan pada saat ekonomi Indonesia, umumnya di pedesaan Jawa, masih sangat parah sebagai akibat adanya Perang Dunia II dan perang kemerdekaan yang baru berakhir pada tahun 1950. Pada waktu itu aktivitas ekonomi masih belum berkembang dan desa-desa relatif terisolasi. Akan tetapi, akibat proses pembangunan yang telah berlangsung desa-desa tersebut mengalami perkembangan pesat sehingga teori Geertz tidak sesuai lagi dengan kondisi sekarang ini. Kemiskinan masih meluas, tetapi program pembangunan pedesaan

paling tidak telah mampu mengurangi jumlah penduduk miskin yang tinggal di sana.

Menurut Collier meluasnya kemiskinan di pedesaan merupakan akibat adanya teknologi baru di sektor pertanian yang lebih mengandalkan teknologi modern dan membatasi tenaga kerja, terutama bagi petani kecil dan buruh tani sehingga peluang kerja bagi penduduk miskin telah berkurang. Pandangan Collier ini dibantah oleh Mourer yaitu tidak ada bukti-bukti yang kuat bahwa teknologi baru telah mengurangi peluang kerja (Effendi dkk., 1993). Meskipun demikian, ada bukti sah yang menyatakan bahwa peluang kerja di sektor pertanian mengalami penurunan.

Sebagai respon terhadap penurunan kesempatan kerja di sektor pertanian, aktivitas nonpertanian mulai berkembang di pedesaan. Banyak penduduk pedesaan beraktivitas nonpertanian pada saat sektor pertanian sepi (menunggu masa panen). Hal yang melatarbelakangi banyaknya penduduk beraktivitas di sektor nonpertanian ini berkisar pada masalah kesempatan kerja dan pendapatan.

- 1) Tidak cukupnya pendapatan di bidang usaha tani, misalnya, karena luas usaha tani sempit, diperlukan tambahan pendapatan.
- 2) Pekerjaan dan pendapatan di bidang usaha tani umumnya bersifat musiman sehingga diperlukan waktu tunggu yang relatif lama sebelum pendapatan bisa dinikmati. Dalam situasi demikian peranan pekerjaan yang memberikan pendapatan di luar usaha tani amat penting.

- 3) Usaha tani banyak mengandung risiko dan ketidakpastian, misalnya, panen gagal, produksi amat merosot atau rendah karena serangan hama penyakit, kekeringan, dan banjir. Oleh karena itu, diperlukan pekerjaan dan pendapatan cadangan guna mengatasi masalah yang ada (Sawit, 1979).

Rendahnya pendapatan rumah tangga miskin menyebabkan banyak yang melakukan mobilitas dalam usaha meningkatkan pendapatan. Kondisi sosial ekonomi di pedesaan atau daerah asal yang tidak memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga telah menyebabkan timbulnya keinginan untuk pergi ke daerah lain yang dapat memenuhi kebutuhan (Mantra, 1992: 1).

Dalam rangka mengatasi masalah kemiskinan yang ada di pedesaan, sejak tahun 1950-an telah ditempuh berbagai macam kebijakan pembangunan yang ditujukan untuk masyarakat pedesaan. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan di pedesaan adalah dengan pemberian dana Inpres Desa Tertinggal (IDT) yang ditujukan kepada penduduk miskin. Sasaran khusus program IDT adalah peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi penduduk miskin melalui upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan kemampuan permodalan, pengembangan usaha, dan pementapan kelembagaan usaha bersama bagi masyarakat miskin. Adapun tujuannya adalah meningkatkan taraf hidup penduduk miskin dengan cara menciptakan dan memperluas lapangan kerja produktif

melalui peningkatan berbagai kegiatan pembangunan. Meskipun demikian, dalam kenyataannya masalah kemiskinan masih merupakan masalah serius yang memerlukan perhatian khusus dari semua pihak.

Pada prinsipnya, rumah tangga miskin dihadapkan pada persoalan yang sangat mendasar, yaitu bagaimana memenuhi kebutuhan pokok mereka. Hal ini sangat fundamental karena kebutuhan pokok merupakan kebutuhan yang sangat penting guna kelangsungan hidup manusia, baik yang terdiri dari kebutuhan individu (seperti makan, pakaian, perumahan) maupun keperluan akan pelayanan sosial tertentu (seperti air minum, transportasi, kesehatan, dan pendidikan) (Pitomo, 1982: 2). Kebutuhan pokok ini merupakan kebutuhan esensial yang sedapat mungkin harus dipenuhi oleh suatu rumah tangga agar dapat hidup layak. Permasalahan yang kemudian muncul adalah bagaimana strategi rumah tangga miskin untuk mempertahankan kelangsungan hidup mereka?

Tulisan ini merupakan usaha untuk menjawab pertanyaan tersebut melalui penelitian lapangan yang dilakukan di salah satu desa miskin (tertinggal), yaitu Desa Canden, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Responden dalam penelitian ini adalah rumah tangga miskin. Penentuan rumah tangga miskin didekati dengan menggunakan dasar asumsi bahwa rumah tangga yang mendapat bantuan dana usaha bersama (dana IDT) dari pemerintah merupakan rumah tangga miskin. Asumsi ini sekaligus dikemukakan dalam rangka untuk melakukan konfirmasi apakah

memang secara objektif penerima dana IDT adalah rumah tangga miskin. Di dalam penelitian ini diambil 50 persen rumah tangga penerima dana IDT dari jumlah keseluruhan 400 rumah tangga. Pemilihan responden dilakukan dengan metode *systematic random sampling*.

Canden: Profil Desa Tertinggal

Desa Canden terdiri dari 15 dusun yaitu: Dusun Gadungan Kepuh, Gadungan Pasar, Jayan, Wonolopo, Kiringan, Ngibikan, Banyudono, Suren Kulon, Suren Wetan, Gaten, Beran, Plembutan, Canden, Kralas, dan Pulokadang. Secara fisiografis Desa Canden merupakan daerah yang relatif datar dengan ketinggian antara 25-27m di atas permukaan laut, dengan curah hujan per tahun antara 1.500-2.000 mm/tahun dengan suhu rata-rata 27°C. Kondisi ini mempengaruhi jenis tanah di Desa Canden. Jenis tanah di Desa Canden adalah regosol yang berasal dari batuan induk abu vulkanis Merapi dengan ciri berwarna abu-abu. Jenis tanah ini mempunyai tingkat kesuburan tinggi sampai sedang sehingga daerah ini cocok sebagai daerah pertanian. Sebagaimana ciri pedesaan, sebagian besar lahan di Desa Canden digunakan sebagai lahan pertanian (54 persen). Sementara itu sebagian besar penduduknya (61,5 persen) masih menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Sektor industri hanya menyerap kurang dari 6 persen angkatan kerja dan sisanya terserap di sektor jasa. Hal ini merupakan gambaran bahwa sektor industri, termasuk yang berskala kecil, kurang berkembang di desa tersebut.

Potensi daerah yang ada, terutama lahan pertanian, tidak dapat mendukung kehidupan penduduk Desa Canden. Sempitnya rata-rata lahan pertanian yang dimiliki oleh keluarga yaitu hanya 0,11 ha, tidak jauh berbeda dengan pemilikan lahan pertanian pada umumnya di pedesaan yaitu kurang dari 0,50 ha. Hal ini berarti bahwa petani di Desa Canden pada umumnya merupakan petani gurem sehingga hasil pendapatan dari sektor pertanian belum dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan, akibatnya taraf hidup penduduk masih rendah.

Desa Canden bukan merupakan daerah yang terisolasi karena terletak 15 km di sebelah selatan Kota Yogyakarta, berjarak 5 km dari ibukota kecamatan, dan terletak 7 km dari Kabupaten Bantul. Adanya jalan beraspal yang menembus Desa Canden memungkinkan sarana transportasi dapat masuk ke sana. Hal ini akan semakin mempermudah penduduk untuk melakukan mobilitas ke Kota Yogyakarta. Kondisi tersebut sebenarnya agak aneh karena dengan aksesibilitas yang relatif tinggi tersebut, kemungkinan terjadinya transformasi ekonomi yang mengarah ke perbaikan kesejahteraan penduduk mestinya juga lebih besar. Akan tetapi, kenyataannya desa tersebut masih termasuk ke dalam kategori desa tertinggal.

Jumlah penduduk Desa Canden pada tahun 1995 berjumlah 9.746 jiwa, terdiri dari penduduk laki-laki sebesar 4.632 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 5.114 jiwa. Kepadatan penduduk Desa Canden pada tahun 1995 sebesar 1818 jiwa/km. Selama kurun waktu 1991-1995 pertumbuhan

penduduk di desa ini tergolong rendah yaitu 0,5 persen per tahun.

Dilihat dari strukturnya, penduduk Desa Canden sebagian besar berada dalam usia 20-44 tahun yaitu sebesar 35,01 persen dan usia anak-anak (0-14) sebesar 28,07 persen. Persentase penduduk usia kurang dari 15 tahun yang besarnya 28,07 persen menunjukkan bahwa struktur penduduk Desa Canden adalah struktur muda karena besarnya kurang dari 40 persen. Banyaknya penduduk yang terkonsentrasi pada usia muda merupakan persoalan tersendiri apabila dikaitkan dengan penyediaan lapangan pekerjaan, khususnya di luar sektor pertanian. Hal ini disebabkan banyak pemuda tidak lagi berminat bekerja di sektor pertanian. Di Desa Canden persoalan tersebut lebih rumit lagi karena sebagian besar (85,1 persen) penduduknya mempunyai tingkat pendidikan di bawah SD/tamat SD.

Tingkat Kemiskinan

BPS (1993b) menghitung jumlah dan persentase penduduk miskin dengan menetapkan batas kecukupan atau garis kemiskinan yang didasarkan pada data pengeluaran konsumsi rumah tangga hasil survai sosial ekonomi nasional (Susenas). Garis kemiskinan merupakan jumlah dari batas kecukupan pangan dan batas kecukupan nonpangan. Batas kecukupan pangan dihitung dengan menetapkan sebanyak 52 komoditi pangan, yang selayaknya dikonsumsi seseorang agar bisa hidup sehat, yang kandungan kalornya 2100 kkal per hari. Batas kecukupan nonpangan dihitung dari nilai 46 komoditi yang

ditetapkan sebagai komoditi nonpangan.

Perhitungan penduduk miskin untuk tahun 1996, oleh BPS dilakukan dengan dasar hasil survai paket komoditi kebutuhan dasar 1995, dengan 5.000 rumah tangga sampel KOR Susenas 1995 yang tersebar di 27 propinsi. Batas ambang miskin untuk pedesaan adalah Rp30.000,00 - Rp40.000,00 pengeluaran per kapita per bulan. Dasar asumsinya adalah rumah tangga yang mempunyai pengeluaran per kapita per bulan antara Rp30.000,00 - Rp40.000,00 dapat mewakili rumah tangga yang sedikit berada di atas ambang kemiskinan (Subagio dan Mutijo, 1996).

Berdasarkan perhitungan menurut BPS ini ternyata sebagian besar rumah tangga penerima dana IDT termasuk ke dalam kategori miskin (99,9 persen). Hanya 1 rumah tangga yang tidak tergolong tidak miskin. Hal ini merupakan justifikasi bahwa dana IDT, khususnya di Desa Canden, sudah mengenai sasarannya, yaitu rumah tangga miskin. Kelompok penduduk yang tergolong hampir miskin, yang mempunyai pengeluaran per kapita

Tabel 1
Tingkat Kemiikinan Rumah Tangga
Penerima Dana IDT menurut DPS

Tingkat Kemiskinan	Batas Miskin (pengel.Rp/ kapita/bulan)	Jumlah	Persentase
Sangat miskin	< 15.000	35	17,5
Miskin	15.000-30.000	161	80,5
Hampir miskin	30.000-40.000	3	1,5
Tidak miskin	> 40.000	1	0,01
Jumlah		200	100

Sumber: Data Primer, 1995.

per bulan antara Rp30.000,00 - Rp40.000,00 meskipun hanya berjumlah 1,5 persen, perlu mendapatkan perhatian. Rumah tangga yang tergolong hampir miskin ini rentan terhadap perubahan ekonomi sehingga kemungkinan menjadi miskin juga besar.

Sementara itu, batas kemiskinan yang lain adalah dari Sayogyo dengan menggunakan konsep tingkat pengeluaran ekuivalen beras. Pada awalnya garis kemiskinan ini adalah 240 kg beras per orang per tahun untuk pedesaan. Perkembangan selanjutnya adalah ketentuan garis kemiskinan berubah menjadi lebih rinci. Klasifikasi yang baru ini tampaknya mampu mengelompokkan penduduk secara lebih rinci (Faturachman dan Molo, 1994). Pengeluaran rumah tangga per bulan akan digunakan sebagai proksi terhadap tingkat kemiskinan. Tingkat kemiskinan diperoleh dengan membagi pengeluaran rumah tangga dengan harga beras yang berlaku saat penelitian yaitu Rp750,00 per kg pada tahun 1995. Berdasarkan harga beras yang sedang berlaku saat penelitian dilakukan, maka tingkat kemiskinan untuk rumah tangga penerima dana IDT dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2 memperlihatkan bahwa dengan batasan Sayogyo, hasilnya tidak jauh berbeda dengan menggunakan metode BPS. Rumah tangga penerima dana IDT sebagian besar tergolong miskin (98 persen), yang tergolong tidak miskin sebesar 3 persen. Dengan menggunakan metode Sayogyo secara absolut/relatif penduduk tidak miskin mengalami kenaikan lebih sedikit bila dibandingkan dengan metode BPS. Hal ini terjadi

Tabel 2
Tingkat Kemiskinan Rumah Tangga Penerima Dana IDT menurut Batasan Sayogyo

Tingkat Kemiskinan	Batas Miskin (pengel.kg/kapita/bulan)	Jumlah	Persentase
Sangat miskin	< 20 kg	17	8,5
Miskin	20-26 kg	166	83,0
Hampir miskin	26-40 kg	13	6,5
Tidak miskin	> 40 kg	6	3,0
Jumlah		200	100

Sumber: Data Primer, 1995.

karena garis kemiskinan dari Sayogyo lebih rendah bila dibandingkan dengan metode BPS.

Penduduk miskin dapat juga didekati dengan melihat komposisi pengeluaran bahan makanan (kurva Engel). Menurut Engel ada hubungan antara pendapatan dengan proporsi pendapatan yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan pangan. Semakin tinggi pendapatan rumah tangga, semakin kecil proporsi penghasilan yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan pangan. Tingkat kemiskinan ditentukan dari proporsi pengeluaran untuk makan per orang per bulan dalam suatu rumah tangga, yang dibedakan menjadi 3 tingkatan.

Berdasarkan kurva Engel, rumah tangga penerima dana IDT sebagian besar masuk dalam kategori miskin (99,9 persen), yang sebagian besar tergolong sangat miskin. Rumah tangga yang tergolong tidak miskin kecil sekali yaitu hanya 0,01 persen seperti hasil perhitungan BPS. Hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga penerima dana IDT ini memang berada dalam kondisi kekurangan atau belum

Tabel 3
Tingkat Kemiskinan Rumah Tangga Penerima
Dana IDT menurut Kurva Engel

Tingkat Kemiskinan	Batas Miskin (% pengel. makan/kapita/bln)	Jumlah	Persentase
Sangat miskin	> 80%	103	51,1
Miskin	69-80%	92	46,0
Hampir miskin	57-68%	4	2,0
Tidak miskin	< 57%	1	0,01
Jumlah		200	100

Sumber: Data Primer, 1995.

dapat mencukupi kebutuhan hidup minimum. Pada rumah tangga miskin ini, rendahnya tingkat penghasilan menyebabkan sebagian besar pendapatan hanya dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan pangan. Bagi rumah tangga miskin masalah kebutuhan pangan merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi kelangsungan hidup keluarga.

Perhitungan rumah tangga miskin dengan menggunakan 3 metode tersebut pada dasarnya diperoleh dari hasil jumlah rumah tangga miskin dan tidak miskin yang tidak jauh berbeda (Tabel 4). Rumah tangga penerima dana IDT menurut metode BPS dan kurva Engel yang masuk kategori tidak miskin lebih rendah bila dibandingkan dengan metode Sayogjo. Hal ini terjadi karena untuk batas miskin kategori menurut Sayogjo lebih rendah bila dibandingkan dengan kriteria BPS dan Kurva Engel. Jumlah rumah tangga yang tergolong sangat miskin dan miskin pada metode BPS dan Sayogjo diperoleh dengan angka yang hampir sama, sedangkan dengan menggunakan kurva Engel justru sebagian besar

tergolong dalam rumah tangga sangat miskin. Berdasarkan kurva Engel, batas miskin dengan menggunakan besarnya proporsi pengeluaran pangan, pada rumah tangga miskin terlihat bahwa sebagian besar pendapatan hanya dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan pangan. Hal ini menyebabkan jumlah rumah tangga sangat miskin berdasarkan kurva Engel cukup besar bila dibandingkan dengan metode BPS dan Sayogjo.

Pengukuran tingkat kemiskinan dengan menggunakan ketiga metode pengukuran tersebut menghasilkan kesimpulan yang senada yaitu bahwa sebagian besar penerima dana IDT termasuk ke dalam golongan miskin. Program IDT yang ditujukan untuk penduduk miskin telah mencapai sasaran. Kondisi ini berbeda dengan beberapa sinyalemen yang mengatakan bahwa dana IDT telah diberikan kepada penduduk tidak miskin.

Pada bagian berikutnya pembahasan ditekankan pada rumah tangga sangat miskin dan miskin. Di samping alasan yang bersifat teknis, yaitu golongan yang hampir miskin jumlahnya sangat sedikit, pembagian dua golongan ini diharapkan mampu memberikan informasi mengenai adanya strata di dalam kelompok miskin itu. Pembagian ini juga akan mempermudah memahami problema kemiskinan secara lebih rinci.

Karakteristik Rumah Tangga Miskin

Secara umum dapat dijelaskan bahwa kepala rumah tangga miskin adalah laki-laki dengan rata-rata umur 42 tahun. Tidak ada perbedaan antara rumah tangga sangat miskin dan yang

Tabel 4
Tingkat Kemiakinan Rumah Tangga Penerima Dana IDT menurut BPS, Sayogjo dan Kurva Engel

Tingkat Kemiskinan	BPS		Sayogjo		K. Engel	
	N	%	N	%	N	%
Sangat miskin	35	17,5	17	8,5	103	51,5
Miskin	161	80,5	166	83,0	92	46,0
Hampir miskin	3	1,5	13	6,5	4	2,0
Tidak miskin	1	0,01	6	3,0	1	0,01
Jumlah	200	100,0	200	100,0	200	100,0

Sumber: Data Primer 1995.

miskin. Dilihat dari pendidikannya, sebagian besar (lebih dari 70 persen) kepala rumah tangga tersebut berpendidikan rendah (SD ke bawah). Meskipun demikian, hampir 90 persen dari mereka melek huruf. Kemanipulan baca ini merupakan modal dasar yang penting karena dengan melek huruf diharapkan informasi untuk melakukan perubahan dapat diserap oleh mereka.

Tampaknya tingkat pendidikan yang rendah tersebut menyebabkan mereka hanya mampu masuk ke sektor *unskilled work* yaitu di sektor pertanian (37,5 persen). Mereka yang terserap di sektor nonpertanian, pada umumnya bekerja pada sektor-sektor yang mempunyai produktivitas rendah, misalnya sektor jasa (terutama yang mengandalkan kekuatan fisik) seperti: tukang becak, buruh bangunan, pedagang, dan buruh industri kecil. Sektor tersebut biasanya dicirikan oleh jam kerja yang panjang dan pendapatan yang rendah.

Terdapat sedikit perbedaan pekerjaan kepala rumah tangga menurut tingkat kemiskinannya. Pada rumah tangga sangat miskin, kepala

rumah tangga yang bekerja di sektor pertanian sebanyak 43 persen, sedangkan pada rumah tangga miskin hanya 25,5 persen. Hal ini merupakan indikasi bahwa kemiskinan erat kaitannya dengan sektor pertanian dan disebabkan oleh sempitnya penguasaan lahan pertanian.

Pada rumah tangga miskin, terutama yang masih menggantungkan hidup dari sektor pertanian, salah satu cara untuk menghemat pengeluaran biaya produksi ialah dengan memanfaatkan tenaga kerja keluarga. Hal ini ditunjukkan oleh masih besarnya status pekerjaan kepala rumah tangga yang dibantu anggota rumah tangga lain. Pada rumah tangga miskin, status pekerjaan kepala rumah tangga miskin yang dibantu buruh sangat kecil. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya kemampuan menggaji buruh karena untuk memenuhi biaya hidup saja masih kurang.

Pada masyarakat pedesaan yang masih menggantungkan hidup dari sektor pertanian, luas penguasaan lahan, terutama lahan pertanian, sangatlah penting karena lahan pertanian merupakan modal. Rata-rata

Table 5
Penguasaan Lahan (Pekarangan, Tegalsn, dan Sewah)
baik Lahan Milik Sendiri, Sewa, maupun Bsgj Hasil menurut Tingkat Kemiskinan

Penguasaan Lahan Pertanian (ha)	Sangat miskin		Miskin		Jumlah	
	N	%	N	%	N	%
Tidak punya	8	22,9	33	20,0	41	20,5
0,01-0,25	23	65,7	113	68,5	138	68,0
>0,25	4	11,4	19	11,5	23	11,5
Jumlah	35	100,0	165	100,0	200	100,0
Rata-Rata		0,07		0,06		0,06

Sumber: Data Primer, 1995.

penguasaan lahan pertanian pada rumah tangga miskin, bila dirinci menurut tingkat kemiskinan, menunjukkan bahwa rumah tangga sangat miskin mempunyai lahan pertanian yang lebih luas bila dibandingkan dengan rumah tangga miskin. Rumah tangga sangat miskin yang tidak mempunyai lahan pertanian lebih banyak bila dibandingkan dengan rumah tangga miskin. Hal ini menunjukkan bahwa pada rumah tangga sangat miskin, yang bekerja sebagai petani justru mempunyai penguasaan lahan pertanian lebih luas bila dibandingkan dengan rumah tangga miskin. Sempitnya lahan pertanian yang dimiliki oleh rumah tangga miskin bila dibandingkan dengan rumah tangga sangat miskin menyebabkan banyak anggota rumah tangga miskin melakukan mobilitas keluar Desa Canden.

Sempitnya kepemilikan lahan pertanian menyebabkan hasil dari sektor pertanian belum dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup minimum. Akibatnya, banyak

rumah tangga miskin memanfaatkan peluang kerja di luar sektor pertanian, terutama yang ada di perkotaan dalam upaya untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga.

Sebagian besar rumah tangga miskin ini memiliki total pendapatan per tahun antara Rp800.000,00 - Rp1.200.000,00. Rumah tangga miskin yang mempunyai pendapatan lebih dari Rp1.200.000,00 per tahun sangat kecil. Sebanyak 70 persen rumah tangga mempunyai pengeluaran yang lebih besar daripada pendapatannya. Dalam keadaan normal, seharusnya antara pendapatan dan pengeluaran itu harus seimbang. Akan tetapi, dalam kenyataan banyak rumah tangga miskin mempunyai pengeluaran lebih besar daripada pendapatan. Hal ini disebabkan oleh sukarnya memperoleh data pengeluaran rumah tangga sehingga ada perkiraan pengeluaran terlalu tinggi atau pendapatan terlalu rendah.

Menurut BPS, agar dapat hidup secara layak, minimum pengeluaran per bulan per kapita adalah

Rp40.000,00. Menurut Sayogjo agar dapat hidup secara layak, pengeluaran per bulan per kapita adalah setara dengan 40 kg beras. Pada rumah tangga miskin, pengeluaran rata-rata per bulan per kapita bila disetarakan dengan besarnya beras yang dapat dikonsumsi mereka hanya 23 kg. Rata-rata pendapatan rumah tangga miskin sebesar Rp82.042,00 per bulan dengan rata-rata jumlah anggota rumah tangga 5 orang. Dengan demikian, rata-rata pengeluaran per kapita per bulan hanya Rp16.408,00. Besarnya pendapatan rumah tangga miskin ini masih rendah bila dibandingkan dengan standar agar dapat hidup secara layak. Hal ini menyebabkan belum terpenuhinya kebutuhan minimum pada rumah tangga miskin. Tingkat kemiskinan pada rumah tangga miskin ini menunjukkan bahwa pada rumah tangga sangat miskin, sebagian besar mempunyai pendapatan per tahun sebesar Rp800.000,00, sedangkan pada rumah tangga miskin sebagian besar mempunyai pendapatan antara Rp800.000,00 - Rp1.200.000,00. Rumah tangga sangat miskin yang mempunyai pendapatan lebih dari Rp1.200.000,00 sebesar 22,9 persen, tetapi karena jumlah tanggungan besar, menyebabkan pendapatan yang diperoleh belum dapat memenuhi kebutuhan hidup.

Kebutuhan minimum merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi agar dapat hidup secara layak. Rendahnya pendapatan pada rumah tangga miskin menyebabkan belum terpenuhinya kebutuhan minimum. Hal ini mendorong rumah tangga miskin harus melakukan berbagai cara dan usaha agar dapat memenuhi kebutuh-

an minimum atau meningkatkan pendapatan untuk mempertahankan kelangsungan hidup keluarga.

Strategi Kelangsungan Hidup Rumah Tangga Miskin

1. Meningkatkan Pendapatan

Pemilikan lahan pertanian bagi penduduk di pedesaan merupakan hal yang sangat penting karena sebagian besar penduduk masih menggantungkan hidup dari sektor pertanian. Sempitnya lahan pertanian yang dimiliki menyebabkan pendapatan yang diperoleh dari sektor pertanian belum dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga. Kondisi ini umum dijumpai di pedesaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi petani di Desa Balecatur tercatat lebih dari 63 persen mempunyai kepemilikan lahan kurang dari 0,5 ha. Pemilikan lahan pertanian yang sempit tidak memungkinkan untuk mengembangkan taraf hidup (Sukamdi, 1996). Hal ini mendorong rumah tangga miskin mencari tambahan pendapatan, terutama dengan cara mencari pekerjaan di

Tabel 6
Total Pendapatan Rumah Tangga Miskin
Selama Satu Tahun menurut Tingkat Kemiskinan

Total Pendapatan (dalam ribuan per tahun)	Sangat miskin		Miskin	
	N	%	N	%
< Rp800	15	42,9	45	27,3
Rp800-1.200	12	34,2	82	49,7
> Rp1.200	6	22,9	38	23,0
Jumlah	35	100,0	165	100,0

Sumber: Data Primer, 1995.

sektor nonpertanian. Adanya keterbatasan kesempatan kerja nonpertanian yang ada di desa telah mendorong mereka pergi ke luar desa, terutama ke perkotaan untuk bekerja dalam usaha memenuhi dan meningkatkan pendapatan. Berikut ini dibahas cara-cara yang dilakukan rumah tangga miskin dalam usaha meningkatkan pendapatan guna mencukupi kebutuhan minimum keluarga.

a. Memperpanjang Jam Kerja

Di pedesaan banyak penduduk yang bekerja lebih dari satu jenis pekerjaan (mereka mempunyai pekerjaan sampingan). Pekerjaan pokok merupakan mata pencaharian yang membutuhkan curahan jam kerja lebih banyak. Sementara itu, pekerjaan sampingan dilakukan untuk memperoleh penghasilan tambahan karena kebutuhan pokok tidak dapat terpenuhi hanya dari penghasilan pekerjaan pokok. Salah satu usaha untuk meningkatkan pendapatan adalah memperpanjang jam kerja, baik pada pekerjaan pokok maupun sampingan.

Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa jenis pekerjaan pokok/sampingan anggota rumah tangga miskin merupakan pekerjaan yang mempunyai produktivitas rendah, seperti sebagai petani, buruh tani, buruh bangunan, tukang becak, buruh industri rumah tangga, dsb. Sebagian besar kepala rumah tangga miskin (56 persen) bekerja pada sektor jasa, seperti sebagai buruh bangunan, tukang becak, bengkel dsb., sedangkan yang bekerja di sektor pertanian hanya 27

persen. Kepala rumah tangga yang memilih bekerja sebagai petani ini biasanya karena alasan usia tua dan memiliki lahan pertanian penopang kehidupan keluarga, walaupun dalam kondisi minimum. Hal ini menyebabkan pendapatan rumah tangga miskin belum dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga. Sekitar 89,5 persen kepala rumah tangga miskin mempunyai pekerjaan pokok dengan curahan jam kerja antara 30-60 jam/minggu, bahkan ada yang bekerja di atas batas standar penggunaan tenaga kerja penuh (40 jam/minggu), yaitu 60 jam/minggu; inereka tercatat sebanyak 2 persen. Kepala rumah tangga yang mempunyai curahan jam kerja rendah kurang dari 30 jam/minggu biasanya mempunyai pekerjaan pokok di sektor pertanian. Meskipun kepala rumah tangga miskin mempunyai jam kerja yang panjang, inereka inasih sempat melakukan pekerjaan sampingan. Sekitar 65 persen kepala rumah tangga miskin ini menyatakan mempunyai pekerjaan sampingan. Pekerjaan sampingan yang banyak dilakukan oleh kepala rumah tangga miskin ini terutama adalah petani dan buruh tani (60,5 persen). Pada hari-hari tidak libur bekerja, terutama pada Minggu, mereka mengerjakan lahan pertanian yang dimiliki. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan dari pekerjaan pokok belum dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup rumah tangga sehingga mereka harus dapat memanfaatkan waktu untuk meningkatkan pendapatan.

Jenis pekerjaan sampingan yang biasa dilakukan merupakan pekerjaan yang bersifat musiman. Jenis pekerjaan

Tabel 7
Rata-Rata Curahan Jam Kerja Anggota Rumah
Tangga Miskin menurut Tingkat Kemiskinan

Tingkat Kemiskinan	Curahan Jam kerja jam/minggu	
	Kepala RT	ART lain
Sangat miskin	48	20
Miskin	51	25
Rata-Rata Curahan Jam Kerja	50	23

Sumber: Data Primer, 1995.

sampingan yang dilakukan oleh kepala rumah tangga miskin sebagian besar adalah petani dan buruh tani. Curahan jam kerja pada pekerjaan pokok dan sampingan antara rumah tangga sangat miskin dan miskin berbeda (Tabel 7). Curahan jam kerja kepala rumah tangga miskin dari pekerjaan pokok dan sampingan berada di atas penggunaan tenaga kerja penuh (40 jam/minggu) yaitu rata-rata 50 jam/minggu.

Salah satu cara yang dilakukan oleh rumah tangga miskin untuk meningkatkan pendapatan ialah dengan cara mencurahkan jam kerja lebih besar. Mereka melibatkan anggota rumah tangga lain yang ada dalam rumah tangga, baik sebagai tenaga kerja keluarga atau sebagai tenaga kerja upahan. Rata-rata curahan jam kerja anggota rumah tangga miskin selain kepala keluarga sangat rendah, ialah hanya 23 jam/minggu. Angka ini di bawah jam kerja penggunaan tenaga kerja penuh. Curahan jam kerja anggota rumah tangga miskin menurut tingkat kemiskinan menunjukkan bahwa curahan jam kerja anggota rumah tangga miskin lebih besar

dibandingkan dengan curahan jam kerja anggota rumah tangga sangat miskin. Rendahnya curahan jam kerja anggota rumah tangga miskin ini menunjukkan bahwa potensi tenaga kerja belum dimanfaatkan secara penuh. Hal ini disebabkan tulang punggung ekonomi berada pada kepala rumah tangga sehingga anggota rumah tangga lain hanya berfungsi membantu ekonomi keluarga.

Pada rumah tangga miskin, curahan jam kerja kepala rumah tangga sudah berada di atas standar penggunaan tenaga kerja penuh (40 jam/minggu). Akan tetapi, anggota rumah tangga lain mempunyai curahan jam kerja sangat rendah. Hal ini terjadi karena tulang punggung ekonomi masih sangat tergantung pada penghasilan kepala rumah tangga sehingga anggota rumah tangga lain kurang dapat dimanfaatkan secara penuh. Curahan jam kerja rumah tangga miskin, bila dirinci menurut tingkat kemiskinan, tidak menunjukkan perbedaan.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara jam kerja dan pendapatan. Artinya adalah semakin lama bekerja, semakin tinggi pendapatannya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun suatu rumah tangga mempunyai pendapatan relatif tinggi, dalam waktu yang bersamaan jam kerjanya juga tinggi. Rata-rata pendapatan per jam juga kecil. Kondisi tersebut harus diubah untuk mempertinggi pendapatan per jam sehingga untuk memperoleh pendapatan yang sama dapat dilakukan dengan jam kerja lebih pendek.

b. Melakukan Mobilitas

Pertumbuhan penduduk di pedesaan yang lebih cepat daripada pertumbuhan kesempatan kerja menyebabkan mereka yang baru masuk angkatan kerja menemui kesulitan memperoleh pekerjaan. Dalam situasi seperti ini, kebanyakan penduduk desa pergi ke luar desa, terutama ke kota untuk mencari pekerjaan tetap atau sementara. Begitu pula penduduk miskin Desa Canden. Keterbatasan kesempatan kerja di sektor nonpertanian menyebabkan anggota rumah tangga miskin banyak memanfaatkan kesempatan kerja di luar Desa Canden. Adanya perbaikan sarana dan prasarana transportasi telah mempermudah penduduk melakukan mobilitas ke perkotaan. Perbedaan yang berarti dari segi ekonomi dan kesempatan kerja menyebabkan terjadinya mobilitas penduduk dari desa ke kota dengan alasan utama karena desakan ekonomi, terutama sempitnya lahan pertanian di pedesaan (Mantra, 1992: 12-13).

Keterbatasan modal, terutama lahan pertanian, bagi penduduk miskin merupakan salah satu penyebab.

Mereka memilih bekerja di Kota Yogyakarta. Sebagian besar kepala rumah tangga miskin (65,5 persen) menyatakan bahwa mereka bekerja di luar Desa Canden dengan cara melaju dan hanya sebagian kecil yang melakukan mobilitas sirkulasi/mondok. Mobilitas *commuting/nglaju*, terutama dengan mengendarai sepeda, merupakan salah satu strategi yang mereka terapkan untuk menekan biaya transportasi.

Jumlah anggota rumah tangga miskin, selain kepala rumah tangga, justru banyak yang memilih bekerja di Desa Canden. Anggota rumah tangga miskin yang memilih bekerja di Desa Canden biasanya merupakan ibu rumah tangga yang masih mempunyai anak usia balita sehingga mereka harus mengurus keperluan rumah tangga. Akibatnya, mereka memilih bekerja di Desa Canden. Anggota rumah tangga yang bekerja di luar Desa Canden atau di perkotaan berstatus sebagai anak yang sudah tidak bersekolah. Dengan bekerja, mereka merasa dapat membantu ekonomi keluarga. Sebagian pendapatan yang mereka peroleh di samping diberikan kepada orang tua, juga untuk mencukupi kebutuhan sendiri agar tidak membebani keluarga.

Bila dirinci menurut tingkat kemiskinan, anggota rumah tangga miskin yang bekerja menurut tempat kerja menunjukkan adanya perbedaan. Rumah tangga miskin sebagian besar bekerja di luar Desa Canden, sedangkan pada rumah tangga sangat miskin banyak yang bekerja di Desa Canden. Pada rumah tangga sangat miskin, yang bekerja di Desa Canden lebih banyak bila dibandingkan dengan

Tabel 8

Persentase Anggota Rumah Tangga yang Bekerja di Luar Desa Canden, Terutama di Perkotaan menurut Tingkat Kemiskinan

Tempat Kerja	Sangat Miskin	Miskin
Di Desa Canden	51,4	30,9
Diluar Desa Canden	48,6	69,1
Jumlah	35	165
Persentase	100,0	100,0

Sumber: Data Primer, 1995.

rumah tangga miskin karena adanya faktor pendorong mobilitas keluar desa, seperti luas pemilikan lahan pertanian rumah tangga miskin lebih besar daripada rumah tangga sangat miskin. Hal ini berarti bahwa rumah tangga yang bekerja di luar Desa Canden mempunyai tingkat ekonomi yang lebih baik dibandingkan dengan rumah tangga yang bekerja di Desa Canden.

c. Memanfaatkan Anggota Rumah Tangga

Jumlah anggota rumah tangga merupakan modal tenaga kerja pertanian, terutama bagi masyarakat pedesaan yang merupakan masyarakat agraris. Jumlah anggota rumah tangga yang banyak dapat membantu proses produksi pertanian keluarga. Mereka dapat berfungsi sebagai tenaga kerja yang tidak perlu dibayar sehingga akan mengurangi pengeluaran rumah tangga. Di samping dimanfaatkan sebagai tenaga kerja upahan, kadangkala juga sebagai tenaga kerja keluarga, terutama yang berstatus tidak bersekolah. Pemanfaatan anggota rumah tangga usia kerja dan tidak bersekolah lagi diharapkan mampu ikut mengurangi beban ekonomi keluarga.

Sebagian besar kepala rumah tangga miskin merupakan keluarga muda (20-44 tahun). Hal ini akan berpengaruh pada cara pikir dan cara pandang mereka, terutama terhadap anak. Mereka menginginkan anak dapat mempunyai tingkat pendidikan yang lebih baik daripada orang tuanya. Mereka telah sadar akan pendidikan yang tinggi bagi generasi penerus

(terutama anak). Hal ini didukung oleh besarnya rata-rata anggota rumah tangga yang berstatus sekolah yaitu 2 orang per rumah tangga miskin. Kondisi ini akan mempengaruhi jumlah anggota rumah tangga yang dapat dimanfaatkan untuk bekerja secara penuh. Rata-rata jumlah anggota rumah tangga yang bekerja pada rumah tangga miskin adalah 2 orang. Anggota RT yang berstatus masih bersekolah ini hanya dapat dimanfaatkan untuk membantu pekerjaan keluarga atau sebagai tenaga kerja keluarga yang tidak diupah. Banyaknya anak yang berstatus masih sekolah pada rumah tangga miskin menyebabkan rendahnya jumlah anggota rumah tangga miskin yang bekerja, yaitu hanya 2 orang.

Pada rumah tangga miskin, tercatat sedikit sekali yaitu hanya 10 persen yang menyatakan menerima kiriman, baik dari anak maupun saudara yang berada di luar daerah atau bekerja di kota. Di Desa Canden, terutama pada rumah tangga miskin ini, tercatat sedikit sekali yang mengirimkan anggota rumah tangga keluar daerah untuk bekerja karena membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan Effendi (1993) bahwa dari desa yang relatif kurang maju kebanyakan migran permanen dan nonpermanen berasal dari rumah tangga yang status sosial ekonominya berada pada tingkat sedang sampai tinggi. Akibatnya, banyak rumah tangga miskin hanya memanfaatkan kesempatan kerja yang ada di luar Desa Canden, terutama ke Kota Yogyakarta.

Rata-rata jumlah anggota rumah tangga miskin yang bekerja menurut

Tabel 9
Jumlah Anggota Rumah Tangga Miskin yang Bekerja menurut Tingkat Kemiskinan

Jumlah ART Miskin yang Bekerja	Sangat miskin	Miskin
1	85,7	87,0
2+	14,3	13,0
Persentase	100,0	100,0
Jumlah	35	161

Sumber: Data Primer, 1995.

tingkat kemiskinan menunjukkan bahwa pada rumah tangga sangat miskin dan miskin tidak ada perbedaan yaitu 2 orang. Rumah tangga sangat miskin lebih banyak memanfaatkan anggota rumah tangga untuk bekerja. Hal ini ditunjukkan oleh besarnya anggota rumah tangga yang bekerja, yaitu di atas 2 orang, yang lebih besar bila dibandingkan dengan rumah tangga miskin. Pada rumah tangga miskin sebagian besar tulang punggung ekonomi masih tergantung pada penghasilan kepala rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga sangat miskin lebih banyak memanfaatkan anggota rumah tangga lain, selain kepala rumah tangga, untuk membantu ekonomi keluarga bila dibandingkan dengan rumah tangga miskin. Hasil uji korelasi membuktikan bahwa ada hubungan positif antara tingkat kemiskinan dengan besarnya jumlah anggota rumah tangga yang bekerja. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat kemiskinan, semakin besar jumlah

anggota rumah tangga miskin yang bekerja dalam usaha untuk meningkatkan ekonomi keluarga.

d. Memanfaatkan Sumber Lain

Pada rumah tangga miskin, pendapatan yang rendah belum dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup rumah tangga. Hal ini telah menyebabkan mereka mencari sumber lain, terutama dalam usaha memenuhi kebutuhan rumah tangga. Menurut Emil Salim, salah satu ciri orang miskin adalah tidak memiliki kemungkinan untuk memperoleh asset produksi dengan kekuatan sendiri. Pendapatan tidak cukup untuk memperoleh tanah garapan atau modal usaha sedangkan syarat tidak terpenuhi oleh mereka untuk memperoleh kredit perbankan, seperti adanya jaminan dan prosedur yang sulit. Hal ini menyebabkan banyak rumah tangga miskin kurang dapat memanfaatkan sektor formal yang diharapkan dapat membantu ekonomi keluarga.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rumah tangga miskin yang memanfaatkan sumber pinjaman formal seperti KUD dan bank hanya tercatat sekitar 5 persen, sedangkan 70 persen rumah tangga miskin menyatakan sedang melakukan pinjaman dari sektor informal, terutama dari *mending**. Hal ini menunjukkan adanya keterbatasan kemampuan dan kesempatan bagi rumah tangga miskin untuk memanfaatkan sektor formal. Mereka

* *Mending* adalah sistem penjualan barang-barang rumah tangga secara kredit dan diajakan berkeliling.

hanya mampu memanfaatkan sektor informal.

Adanya keterbatasan untuk memanfaatkan sektor formal menyebabkan banyak rumah tangga miskin memanfaatkan sektor informal, seperti berhutang pada *mendring*. *Mendring* menawarkan uang atau barang dengan cara cicilan. Walaupun dijual dengan harga 1,5 kali lipat dari harga kontan, banyak rumah tangga miskin memanfaatkan sektor informal *mendring* sebagai salah satu alternatif untuk dapat memperoleh pinjaman guna mencukupi kebutuhan hidup keluarga.

Sebagian besar rumah tangga miskin memanfaatkan *mendring* sebagai salah satu cara yang mereka tempuh dalam usaha memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga, terutama dalam hal mencukupi alat-alat perlengkapan rumah tangga seperti: alat-alat perlengkapan cuci (ember), alat-alat dapur (panci, wajan dll.), dan tikar. Biasanya barang yang mereka beli berharga antara Rp2.000,00 - Rp20.000,00. Sistem pembayarannya dilakukan dengan cara cicilan per minggu atau per bulan. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan rumah tangga hanya cukup digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok (pangan). Dengan demikian, untuk membeli perlengkapan rumah tangga, walaupun harga tidak terlalu mahal, belum ada anggaran yang dapat digunakan untuk membeli perlengkapan rumah tangga.

Dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dasar, kelompok penghasilan rendah di kota Jakarta menunjukkan bahwa rumah tangga yang berpenghasilan rendah/miskin, untuk membeli

daging seberat seperempat kilo s.d. setengah kilo saja ditempuh dengan cara pembayaran angsuran setiap hari atau setiap minggu (Pitomo, 1982). Hal ini menunjukkan bahwa keterbatasan pendapatan belum dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan atau nonpangan yang sangat penting. Walaupun harga tidak terlalu mahal, hal itu telah mendorong mereka untuk memanfaatkan *mendring* sebagai alternatif.

2. Menghemat Pengeluaran

Pada hakikatnya manusia mempunyai kecenderungan untuk tetap berusaha bertahan hidup. Mereka berusaha memperoleh uang sebagai sarana untuk dapat mencukupi kebutuhan pokok minimum. Rumah tangga miskin yang mempunyai tingkat pendapatan rendah dihadapkan pada makin beragamnya kebutuhan yang harus dipenuhi sehingga mereka membutuhkan biaya yang makin besar. Salah satu cara yang dilakukan rumah tangga miskin untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga guna mempertahankan kelangsungan hidupnya, antara lain, ialah dengan cara melakukan penghematan pengeluaran pangan dan nonpangan. Hal ini dapat dilihat dari besarnya pengeluaran pangan dan nonpangan.

a. Pengeluaran Pangan

Pengeluaran untuk kebutuhan pangan meliputi rata-rata pengeluaran untuk kebutuhan pangan per bulan seperti: beras, lauk-pauk dan sayuran, minyak goreng, minuman (teh, kopi, gula, dll.), tembakau/rokok, dan

lain-lain (misalnya jajanan). Kebutuhan pangan ini merupakan kebutuhan manusia yang paling dasar dan harus dipenuhi sebelum dicukupi kebutuhan lain sebagai upaya untuk mempertahankan kelangsungan hidup rumah tangga. Rata-rata pengeluaran untuk kebutuhan pangan pada rumah tangga miskin dapat dilihat pada Tabel 10.

Pada rumah tangga miskin, dalam usaha memenuhi kebutuhan, terutama pangan, sebagian besar penghasilan digunakan untuk membeli kebutuhan akan beras, lauk-pauk, dan sayuran. Pengeluaran untuk minyak goreng dianggap kurang penting, hanya sebesar 4,5 persen dari pengeluaran total pangan. Bagi rumah tangga miskin, yang penting dapat makan, walaupun hanya dengan sayuran tanpa lauk pauk. Pada rumah tangga miskin, besarnya jumlah anak yang masih berstatus sekolah menyebabkan pengeluaran untuk kebutuhan lainnya (misalnya jajanan) cukup besar.

Kebutuhan pangan bagi rumah tangga miskin merupakan kebutuhan

yang sangat vital agar dapat bertahan hidup. Salah satu cara yang dilakukan rumah tangga miskin untuk memenuhi kebutuhan, terutama pangan, ialah banyak yang melakukan penghematan. Pada rumah tangga miskin, rata-rata sehari makan hanya 2 kali dengan lauk-pauk seadanya, bahkan mereka merasa cukup bila dapat makan dengan sayuran tanpa lauk-pauk. Pada rumah tangga miskin sebagian besar pendapatan hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan, yaitu lebih dari 78 persen dari total pengeluaran. Hal ini berbeda dengan rumah tangga tidak miskin, karena pendapatan yang tinggi, secara proporsional digunakan untuk mencukupi kebutuhan pangan mereka yang jumlahnya lebih kecil.

Adanya penghematan pengeluaran pangan pada rumah tangga miskin ini dapat dilihat dari rata-rata pengeluaran pangan menurut tingkat kemiskinan. Pengeluaran untuk pangan pada rumah tangga miskin menunjukkan bahwa semakin rendah tingkat kemiskinan secara absolut, semakin besar pengeluaran untuk pangan, tetapi secara relatif pengeluaran untuk pangan semakin kecil. Rata-rata pengeluaran untuk pangan pada rumah tangga miskin menurut tingkat kemiskinan dan persentase terhadap total pengeluaran rumah tangga dapat dilihat pada Tabel 11.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada rumah tangga sangat miskin telah terjadi pengurangan jumlah absolut untuk pengeluaran pangan bila dibandingkan dengan rumah tangga miskin. Kondisi ini merupakan salah satu akibat rendahnya pendapatan pada rumah

Tabel 10
Rata-Rata Pengeluaran Pangan per Bulan
Anggota Rumah Tangga Miskin

Jenis Pengeluaran Pangan	Rata-Rata Pengeluaran (Rp/bulan)	Persentase
Beras	32.200	49,8
Laik-pauk dan sayuran	16.600	25,7
Minyak goreng	2.900	4,5
Minuman	3.700	5,7
Rokok/tembakau	3.500	5,4
Lainnya	5.800	9,0
Jumlah	64.700	100,0
Total Pengeluaran Pangan dan Nonpangan	82.500	

Sumber: Data Primer, 1995.

Tabel 11
Rata-Rata Pengeluaran Pangan per Bulan dan Persentase terhadap
Total Pengeluaran Rumah Tangga Miskin menurut Tingkat Kemiskinan

Jenis Pengeluaran Pangan	Sangat miskin		Miskin	
	N	%	N	%
Beras	33.300	54,8	32.600	48,8
Lauk-pauk dan sayuran	13.400	22,0	17.300	26,4
Minyak goreng	2.900	3,6	3.900	4,8
Minuman	3.600	4,9	3.900	5,9
Rokok/tembakau	3.100	5,1	3.600	5,5
Lainnya arisan	5.900	9,7	5.600	8,8
Jumlah	61.600	100	65.600	100
% terhadap total pengeluaran RT	79,4		78,3	

Sumber: Data Primer, 1995.

tangga sangat miskin bila dibandingkan dengan rumah tangga miskin.

Pada rumah tangga miskin rata-rata pengeluaran untuk pangan sebagian besar adalah pemenuhan kebutuhan beras. Secara absolut pada rumah tangga sangat miskin pengeluaran untuk konsumsi beras lebih besar daripada rumah tangga miskin. Pengeluaran untuk lauk-pauk dan sayuran justru terjadi sebaliknya, pada rumah tangga sangat miskin lebih kecil dibandingkan dengan rumah tangga miskin. Hal ini terjadi karena rumah tangga sangat miskin lebih mengutamakan tingkat kenyamanan, sedangkan rumah tangga miskin sudah memperhatikan jenis sayuran dan lauk-pauk.

Pada rumah tangga sangat miskin pengeluaran minyak goreng secara absolut juga lebih rendah bila dibandingkan dengan rumah tangga miskin. Pengeluaran untuk minuman secara absolut menunjukkan bahwa rumah tangga sangat miskin lebih kecil bila dibandingkan dengan rumah

tangga miskin. Kecilnya pengeluaran untuk minuman pada rumah tangga sangat miskin dan miskin ini terjadi karena sebagian besar inereka minum tanpa pemanis atau penyedap, cukup air putih yang sudah dimasak. Pengeluaran untuk tembakau/rokok pada rumah tangga miskin secara absolut menunjukkan adanya peningkatan. Pada rumah tangga sangat miskin, kecilnya pengeluaran untuk tembakau/rokok ini terjadi dalam usaha mereka untuk menghemat pengeluaran yang kurang penting.

b. Pengeluaran Nonpangan

Pengeluaran untuk kebutuhan nonpangan meliputi: perumahan (termasuk minyak tanah, listrik, dll.), transportasi, pendidikan (SPP, alat-alat tulis, dll.), perawatan pribadi (sabun inandi, pasta gigi, sabun cuci, dll.), sandang (pakaian, alas kaki, dan tutup kepala), kesehatan, dan iuran tetap/arisan. Rata-rata pengeluaran untuk

kebutuhan nonpangan pada rumah tangga miskin sangat kecil karena sebagian besar pendapatan rumah tangga digunakan untuk mencukupi kebutuhan pangan.

Rata-rata pengeluaran untuk kebutuhan nonpangan pada rumah tangga miskin sebagian besar (30 persen) digunakan untuk kebutuhan perumahan (penerangan). Pengeluaran untuk pendidikan menempati urutan kedua. Hal ini menunjukkan bahwa pada rumah tangga miskin, sudah ada kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi generasi penerus. Rata-rata pengeluaran terendah bagi rumah tangga miskin adalah pada pengeluaran sandang dan kesehatan, yang besarnya hanya 5,6 persen dari seluruh pengeluaran untuk nonpangan. Adapun rata-rata pengeluaran nonpangan pada rumah tangga miskin dapat dilihat pada Tabel 12.

Pada rumah tangga miskin, rendahnya pendapatan menyebabkan proporsi pengeluaran untuk

mencukupi kebutuhan pangan menjadi besar dan proporsi pengeluaran kebutuhan nonpangan menjadi rendah. Terbatasnya pendapatan untuk mencukupi kebutuhan nonpangan menyebabkan mereka berusaha mendahulukan kebutuhan yang dianggap sangat penting. Rata-rata pengeluaran untuk kebutuhan nonpangan pada rumah tangga miskin secara absolut menunjukkan adanya perbedaan. Semakin rendah tingkat kemiskinan, maka secara absolut dan relatif menunjukkan bahwa pengeluaran untuk nonpangan semakin besar.

Rata-rata pengeluaran nonpangan pada rumah tangga miskin bila dirinci menurut jenis pengeluaran dapat dilihat pada Tabel 13. Pada rumah tangga sangat miskin, pengeluaran paling besar digunakan untuk perawatan pribadi, kemudian untuk keperluan perumahan. Pada rumah tangga miskin, paling besar pengeluaran digunakan untuk nonpangan, perumahan, dan pendidikan. Adanya perbedaan besarnya jenis pengeluaran nonpangan per bulan pada rumah tangga miskin terjadi karena adanya perbedaan kebutuhan yang dianggap penting.

Pengeluaran untuk perumahan (penerangan) pada rumah tangga miskin secara absolut menunjukkan adanya perbedaan. Pada rumah tangga sangat miskin tercatat lebih rendah bila dibandingkan dengan rumah tangga miskin. Hal ini menunjukkan bahwa pada rumah tangga sangat miskin ada penghematan pengeluaran karena secara absolut semakin kecil pengeluaran untuk kebutuhan perumahan.

Salah satu cara yang dilakukan rumah tangga miskin untuk me-

Tabel 12
Rata-Rata Pengeluaran Nonpangan per Bulan pada Rumah Tangga Miskin

Jenis Pengeluaran Non Pangan	Rata-Rata Pengeluaran (Rp/bulan)	Persentase
Perumahan	4.800	30,0
Transportasi	700	3,9
Pendidikan	4.300	24,1
Perawatan pribadi	4.000	22,5
Sandang	800	4,5
Kesehatan	800	4,5
Iuran tetap dan arisan	2.400	13,5
Jumlah	17.800	100,0
Total Pengeluaran Pangan dan Nonpangan	82.500	

Sumber: Data Primer. 1995.

Tabel 13
Rata-Rata Pengeluaran Nonpangan per Bulan dan Persentase
terhadap Total Pangeluaran Rumah Tangga Miskin menurut Tingkat Kemiskinan

Jenis Pengeluaran Non Pangan (Rp./bulan)	Sangat miskin		Miskin	
	N	%	N	%
Perumahan	4.800	25,3	5.800	27,5
Transportasi	0.800	0,0	500	4,9
Pendidikan	3.800	22,6	4.800	24,7
Perawatan pribadi	4.900	31,0	3.700	20,3
Sandang	1.400	8,9	700	3,8
Kesehatan	100	0,6	900	4,9
luran tetap/artisan	1.800	1,4	2.500	13,7
Jumlah	15.800	100	18.200	100
% terhadap total pengeluaran RT	20,6		21,7	

Sumber: Data Primer, 1995.

ngurangi pengeluaran perumahan (penerangan) ialah dengan jalan hanya menggunakan minyak tanah (13 persen) atau banyak yang memasang listrik dengan cara menyalur dari tetangga terdekat. Cara ini menurut mereka dirasakan lebih dapat menekan biaya daripada bila memasang kontak arus listrik sendiri. Hal ini terjadi sesuai dengan hasil penelitian Sukamdi dkk. (1995) yang dilakukan di Desa Balecatur, Gamping, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Di Desa Balecatur, yang merupakan desa miskin, ada sekitar 34,15 rumah tangga yang menggunakan listrik dengan cara menyalur, dan 69,3 persen rumah tangga penyalur ini merupakan rumah tangga yang proporsi pengeluaran untuk pangan sebesar 50 persen atau termasuk kategori cukup miskin.

Rata-rata pengeluaran untuk transportasi pada rumah tangga miskin ini menunjukkan tidak ada perbedaan secara absolut/relatif. Pada rumah tangga sangat miskin dan miskin

pengeluaran untuk transportasi kecil. Mereka lebih memilih menggunakan alat transportasi yang berupa sepeda tanpa biaya. Pada rumah tangga miskin keperluan untuk transportasi kurang penting. Untuk menekan biaya transportasi ini, mereka banyak bersepeda, baik untuk pergi ke luar desa terutama ke Kota Yogyakarta maupun untuk alat transportasi di dalam desa. Alasan utama yang mendorong penduduk pedesaan melakukan mobilitas *commuting/mglaju* dengan cara bersepeda (65,3 persen) adalah perbaikan taraf hidup dan memperoleh pekerjaan (78,6 persen) (Wijoyo, 1994). Pengeluaran untuk pendidikan menurut tingkat kemiskinan menunjukkan adanya peningkatan secara absolut, walaupun secara relatif menunjukkan penurunan. Pengeluaran untuk pendidikan pada rumah tangga sangat miskin tercatat 22,8 persen, sedangkan pada rumah tangga miskin sebanyak 25,8 persen dari pengeluaran total nonpangan. Hal ini menunjukkan

bahwa pada rumah tangga sangat miskin dan miskin, kesadaran untuk menyekolahkan anak sudah baik.

Pengeluaran untuk perawatan prihadi pada rumah tangga miskin secara absolut tidak ada perbedaan. Pengeluaran untuk sandang dan kesehatan pada rumah tangga sangat miskin dan miskin secara absolut sangat rendah. Hal ini terjadi karena sebagian besar rumah tangga miskin setiap tahun belum tentu membeli pakaian, bahkan bila membeli, biasanya pada saat hari-hari besar saja. Begitu juga pengeluaran kesehatan tercatat rendah karena bila sakit, mereka cukup pergi ke puskesmas atau minum obat bebas yang dijual murah di warung-warung.

Pengeluaran untuk iuran/arisan pada rumah tangga sangat miskin dan miskin tidak ada perbedaan yang berarti, tetapi secara absolut menunjukkan bahwa pada rumah tangga sangat miskin lebih kecil dibandingkan dengan rumah tangga miskin. Pada rumah tangga sangat miskin dan miskin, yang penting mereka dapat mencukupi kebutuhan pangan. Mereka mengikuti arisan/iuran yang berlaku bagi semua penduduk. Mereka tidak akan mengikuti arisan yang sifatnya kurang penting karena hal ini hanya akan menambah beban.

Pengeluaran untuk pangan pada rumah tangga miskin merupakan pengeluaran yang paling besar, tercatat lebih dari 78 persen total pengeluaran rumah tangga. Pada rumah tangga miskin pengeluaran untuk pangan dan nonpangan secara absolut menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kemiskinan, semakin kecil jumlah

pengeluaran untuk pangan dan nonpangan. Secara relatif menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kemiskinan, semakin besar pengeluaran untuk pangan dan semakin kecil pengeluaran untuk nonpangan. Sekali lagi, hasil penelitian ini memberikan justifikasi terhadap hasil-hasil penelitian lain yang mengaitkan antara kemiskinan dan pengeluaran.

Penutup

Pada rumah tangga miskin, karena pendapatan yang rendah, mereka belum mampu memenuhi kebutuhan minimum agar dapat hidup secara layak. Hal ini telah mendorong rumah tangga miskin untuk melakukan berbagai macam usaha agar dapat memenuhi kebutuhan hidup guna mempertahankan kelangsungan hidup keluarga. Adapun strategi yang diterapkan oleh rumah tangga miskin untuk meningkatkan pendapatan dengan cara memperpanjang jam kerja ialah melakukan mobilitas, memanfaatkan anggota rumah tangga, dan memanfaatkan sumber lain.

Memperpanjang jam kerja merupakan strategi yang menjadi pilihan ketika rumah tangga miskin tidak lagi mempunyai modal selain tenaga untuk meningkatkan pendapatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa curahan jam kerja kepala rumah tangga miskin rata-rata 51 jam/minggu. Angka ini lebih besar dibandingkan dengan penggunaan tenaga kerja penuh yaitu 35 jam/minggu. Jam kerja panjang ini merupakan dampak dari penambahan pekerjaan selain pekerjaan pokok. Ada 64,5 persen kepala rumah tangga yang

menyatakan mempunyai pekerjaan lain di samping pekerjaan pokok. Tulang punggung ekonomi keluarga pada rumah tangga miskin sangat tergantung pada penghasilan kepala rumah tangga. Anggota rumah tangga lain yang bekerja hanya berfungsi membantu ekonomi keluarga dengan rata-rata curahan jam kerja yang relatif rendah yaitu 23 jam/minggu. Hal ini menunjukkan kurang dimanfaatkannya tenaga kerja yang ada dalam rumah tangga miskin secara optimal.

Sementara itu, keterbatasan pekerjaan yang ada di desa telah mengakibatkan penduduk bekerja di luar desa dalam rangka peningkatan pendapatan. Ada sekitar 65,5 persen kepala rumah tangga miskin dan 39,1 persen anggota rumah tangga lain yang bekerja di luar Desa Canden, dengan cara melakukan mobilitas, terutama mobilitas *commuting/nglaju*. Dorongan ekonomi yang lebih besar pada rumah tangga miskin karena mempunyai lahan pertanian yang lebih sempit dibandingkan dengan rumah tangga sangat miskin juga merupakan faktor yang menjelaskan alasan mereka bekerja di luar desa, khususnya di luar sektor pertanian.

Cara yang dilakukan oleh rumah tangga miskin untuk mengurangi beban ekonomi keluarga ialah dengan cara memanfaatkan anggota rumah tangga, baik sebagai tenaga kerja keluarga maupun upahan. Anggota

rumah tangga miskin yang berstatus masih sekolah biasanya hanya dapat dimanfaatkan sebagai tenaga kerja keluarga dengan jam kerja yang tidak penuh.

Untuk meningkatkan aktivitas ekonomi rumah tangga, ada kecenderungan bahwa rumah tangga miskin lebih memanfaatkan institusi kredit informal, misalnya *mending* daripada institusi formal seperti bank atau KUD. Hal ini disebabkan akses terhadap institusi formal tersebut sangat terbatas. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan perekonomian rumah tangga miskin, salah satu usaha yang perlu mendapat perhatian lebih adalah meningkatkan akses terhadap institusi keuangan formal.

Strategi lain yang dilakukan rumah tangga miskin adalah melakukan penghematan pengeluaran. Hal ini erat kaitannya dengan penentuan skala prioritas untuk pemanfaatan pendapatan. Pada rumah tangga miskin, pangan merupakan kebutuhan pokok sehingga prioritas pertama adalah memenuhi kebutuhan pangan. Oleh karena itu, sangat sulit bagi rumah tangga miskin untuk meningkatkan status ekonomi mereka ketika kebutuhan pangan belum tercukupi. Tidak mengherankan ketika diperoleh hasil bahwa sebagian besar pengeluaran rumah tangga miskin adalah untuk keperluan pangan.

Referensi

- Effendi, Tadjudin Noer. 1993. *Sumber daya manusia, peluang kerja dan kemiskinan*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Effendi, Tadjudin Noer, et al. 1993. "Ekonomi rumah tangga, distribusi pendapatan dan kemiskinan di dua desa di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta: studi kasus di Batur (Klaten) dan Semanu (Gunung Kidul)". *Populasi*, 4(2): 53-68.
- Faturochman dan Marcelinus Molo. 1994. "Karakteristik rumah tangga miskin di Daerah Istimewa Yogyakarta". *Populasi*, 5(1): 75-111.
- Geertz, Clifford. 1974. *Involusi pertanian: proses perubahan ekologi di Indonesia*. Jakarta: Bhatara Karya Aksara.
- Indonesia. Biro Pusat Statistik. 1993a. *Desa miskin 1993: penjelasan dan metodologi*. Jakarta.
- . 1993b. *Hasil perhitungan jumlah dan persentase penduduk miskin*. Jakarta.
- Mantra, Ida Bagoes. 1992. *Mobilitas penduduk sirkuler dari desa ke kota di Indonesia*. Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan, Universitas Gadjah Mada.
- Mubyarto. 1993. *Dua puluh penelitian pedesaan*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Pitomo, Sundoyo. 1982. "Kebutuhan dasar kelompok berpenghasilan rendah di kota Jakarta", dalam Mulyanto Sumardi & Hans-Dieter Evers, ed. *Kemiskinan dan kebutuhan pokok*. Jakarta: Rajawali.
- Rahardjo M., Dawam. 1989. *Transformasi pertanian, industrialisasi dan kesempatan kerja*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Sawit, M. Husein, Yusuf Saefuddin, dan Sri Hartoyo. 1979. "Aktivitas non pertanian, pola musiman dan peluang kerja rumah tangga di pedesaan Jawa", dalam Mubyarto, ed. *Peluang kerja dan berusaha di pedesaan*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi, Universitas Gadjah Mada.
- Subagio, D.W. dan Mutijo. 1996. "Penyempurnaan penghitungan jumlah penduduk miskin dan jumlah desa miskin", dalam Seminar Rekonstruksi Garis Kemiskinan dari Berbagai Tujuan. Yogyakarta: Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada.
- Sukamdi. 1996. "Potensi daerah dan kemiskinan", dalam Seminar Rekonstruksi Garis Kemiskinan dari Berbagai Tujuan. Yogyakarta: Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada.
- Sukamdi, Heru Nugroho dan Wini Tamtiari. 1995. *Listrik, kemiskinan dan perubahan sosial*. Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan, Universitas Gadjah Mada.
- Wijoyo, Ismunaji. 1994. *Pendapatan kepala rumah tangga pertanian dari luar usaha tani di Desa Jatiayu dan Desa Rejiharjo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta*. Yogyakarta: Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada. Skripsi S1.